

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem politiknya. Negara yang menganut sistem demokrasi mempunyai kelebihan tersendiri, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk terlibat menentukan penyelenggaraan negara secara mandiri tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan semangat reformasi yang menjamin kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat serta kebebasan memilih pemimpin sesuai kehendak rakyat.

Di Indonesia berpartisipasi dalam politik dijamin oleh konstitusi negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2005 tentang jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, serta hak mendapatkan keadilan.

Realisasi ketentuan ini dilaksanakan melalui proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang perlu dipertajam adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, serta pengembangan program kebijakan yang lebih pro-rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat (Suastika, 2019).

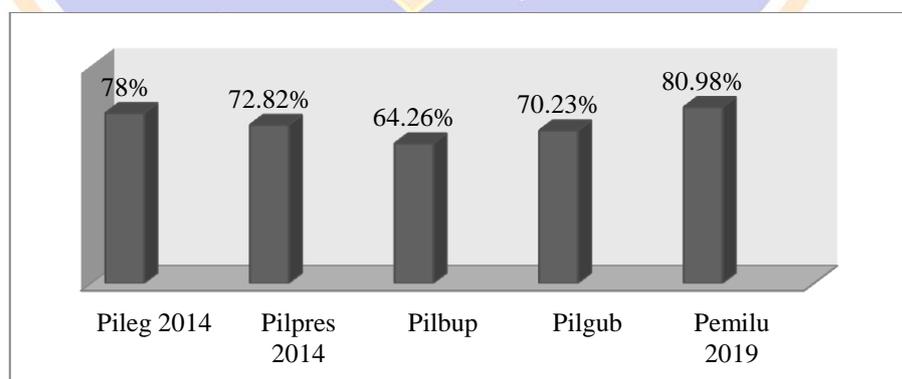
Dalam konteks negara demokrasi, partisipasi politik memberikan pengaruh legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Makin tinggi tingkat partisipasi politik maka, menunjukkan rakyat mengikuti dan melibatkan diri dalam kegiatan pesta demokrasi. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah menunjukkan rakyat kurang mengikuti dan melibatkan diri terhadap pelaksanaan pesta demokrasi atau pelaksanaan pemilihan umum.

Pada tanggal 17 April 2019 Negara Indonesia sudah melaksanakan pemilu serentak dimana dengan adanya Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan Indonesia mencetak sejarah baru dengan menggabungkan dua pemilihan umum dalam waktu yang bersamaan untuk pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dimana rakyat secara langsung memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten

dan memilih presiden dan wakil presiden untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Berdasarkan data dari KPU tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 secara nasional mencapai 80,90%. Presentase ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terkait partisipasi pemilih jika kita bandingkan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang hanya mencapai 75,11%. Fakta ini menjadi suatu prestasi yang menggembirakan bagi Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi terbesar kedua di dunia. Peningkatan partisipasi pemilih terjadi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang mencapai 79.93%.

Peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Jembrana tidak terlepas dari partisipasi di masing-masing desa atau kelurahan di Kabupaten Jembrana yang cukup tinggi. Salah satu desa yang tingkat partisipasinya cukup tinggi adalah di Desa Batuagung yang mencapai 80.98%. Jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih di Desa Batuagung dari pelaksanaan pemilu dan pilkada 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.1**  
**Partisipasi Pemilih di Desa Batuagung**

(Sumber: KPU Daerah Jembrana)

Dalam pemilu tahun 2019 di Desa Batuagung terdapat 7.094 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari 3.641 orang laki-laki dan 3.453 orang perempuan yang tersebar di 25 TPS. Dimana pada tanggal 17 April 2019 sebanyak 5.745 orang yang menggunakan hak pilihnya terdiri dari 2.580 orang laki-laki dan 3.165 orang perempuan. Pencapaian ini merupakan suatu prestasi dan prestise bagi masyarakat Desa Batuagung yang pencapaiannya melebihi partisipasi secara nasional.

Kemudian, berdasarkan data dari KPU Daerah Jembrana terkait hasil pemilu tahun 2019 peneliti juga menemukan fakta menarik terkait perilaku pemilih di Desa Batuagung. Terdapat satu partai politik yang mendominasi perolehan suara hasil pemilu yaitu, PDI Perjuangan baik pemilihan legeslatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasil untuk pemilihan presiden dan wakil presiden menunjukkan pasangan (01) Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'aruf Amin memperoleh suara sebanyak 5.279 (93, 29%) sedangkan, pasangan (02) H. Prabwo Subianto - H. Sandiaga Salahudin Uno memperoleh suara sebanyak 380 (6,71%).

Selanjutnya, untuk hasil pemilihan DPR di Desa Batuagung PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 52,89% suara, kemudian disusul Partai Golkar, dan Hanura. Kemudian, untuk hasil pemilihan DPRD Provinsi di Desa Batuagung kembali PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak yang mencapai 64,9% suara, kemudian disusul Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kondisi yang sama juga terjadi untuk pemilihan DPRD Kabupaten di Desa Batuagung menunjukkan kembali kekuasaan PDI Perjuangan dengan memperoleh suara mencapai 69,83% suara, kemudian disusul Partai Golkar dan

Partai Gerindra. Terakhir, hasil pemilu untuk pemilihan DPD di Desa Batuagung menunjukkan suara terbanyak di raih oleh Dr. Shri I Gusti Arya Wedakarana M.W.S III yang mencapai 30,95% suara.

Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 diikuti oleh banyak partai politik yang masing-masing partai mempunyai latar ideologi yang berbeda-beda serta ditambah lagi dengan jumlah kandidat partai yang ikut bertarung dalam pemilu dengan kemampuan, pengalaman politik, motivasi, serta *track record* yang berbeda-beda tentu mempengaruhi sikap dan perilaku pemilih atau *voting behavior*. Perilaku pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama pada kontestan untuk mereka pengaruh dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmansyah, 2012:480). Sedangkan, Surbakti (1997:170) menyatakan,

Perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*), maka *voters* akan memutuskan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Selanjutnya, Firmanzah (2012:120) memetakan tipologi pemilih ke dalam empat tipe, yaitu: 1) Pemilih Rasional, pemilih tipe ini lebih melihat faktor program kerja partai atau visi-misi kandidat sebagai acuan dalam memilih. Partai politik atau kandidat yang memiliki program kerja paling rasional adalah yang akan mendapat pilihan oleh rakyat; 2) Pemilih Kritis, pemilih tipe ini tidak saja hanya mengandalkan program kerja partai politik atau kandidat yang paling rasional, tetapi secara kritis juga memperhatikan faktor-faktor ketertarikan, kedekatan, dan kesamaan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat apabila partai politik atau calon memenangkan pemilu; 3) Pemilih

Tradisional, pemilih ini cenderung berorientasi pada ikatan-ikatan primordialisme, seperti kesamaan suku, agama, ras maupun etnis; dan 4) Pemilih Skeptis/Apatis, pemilih ini cenderung kurang memiliki kepercayaan terhadap partai politik atau kandidat akan mampu membawa aspirasi rakyat atau akan mampu memperjuangkan nasib rakyat.

Dalam kenyataannya, perilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilu tidak cukup hanya dikelompokkan menjadi empat kategori tersebut. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih Kavanagh (1983:22) menyatakan terdapat tiga model pendekatan, yakni: 1) Pendekatan sosiologis; 2) Pendekatan psikologis; dan 3) Pilihan rasional. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang lebih mengedepankan faktor kelas sosial dan struktur dalam masyarakat dalam menentukan perilaku pemilih, seperti tempat tinggal (perdesaan-perkotaan), jenis kelamin, kasta suku, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

Kemudian, pendekatan psikologis, adalah pendekatan yang lebih menekankan pada respon politik warga terhadap berbagai stimulasi atau rangsangan politik yang diterima selama masa sebelum pemilu dilaksanakan, seperti, mengikuti kampanye, menyaksikan debat kandidat. Hal ini memungkinkan akan terjadi perubahan keputusan dari waktu ke waktu, tergantung pada stimulasi yang diterimanya.

Terakhir, pendekatan pilihan rasional adalah pendekatan yang ditentukan oleh sikap dan tindakan rasional pemilih dalam menilai kinerja pemerintah sebagai cerminan kompetisi politik sebelum pemilu diadakan. Dalam hal ini pemilih rasional lebih mengutamakan untuk memberikan pilihan kepada partai

politik atau kandidat yang telah memberikan manfaat bagi warga, baik secara individu maupun dalam skala lokal, nasional, maupun global.

Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yustingrum (2014) yang meneliti Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan,

Adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak banyak mempengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Kemudian, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya. Sementara itu, dalam memilih calon legislatif, kaum pemilih pemula ini cenderung memilih figur yang terkenal meskipun mereka tahu lebih lanjut tentang latar belakang dan visi misi caleg tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui pertimbangan atau alasan perilaku pemilih di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana. Desa Batuagung yang tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 cukup tinggi, namun belum terdapat kajian secara empiris yang mampu menjelaskan perilaku pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pemilih tersebut. Apalagi, untuk pertama kali Negara Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih anggota legeslatif dan memilih presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Pelaksanaan pemilu yang berkualitas sebagai syarat kehidupan politik yang demokratis membutuhkan adanya perilaku pemilih yang melek atau *literate* secara politik. Hal ini menjadikan partisipasi pemilih bukan saja tinggi secara kuantitas, melainkan juga harus bermutu derajat secara kualitasnya (Sutrisna, 2017:144). Sehingga pada pelaksanaan mendatang “Pemilih cerdas pemilu berkualitas” dapat terwujud dengan optimal.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemilu serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia; 2) Hasil pemilu menunjukkan perilaku pemilih di Desa Batuagung terpusat mendukung satu partai politik sebagai pilihan politiknya; 3) Belum terdapat kajian secara empiris yang mampu menjelaskan perilaku pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pemilih di Desa Batuagung.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perilaku pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pemilih pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana.

## 1.4 Rumusan Masalah

- 1.4.1 Bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana?
- 1.4.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Untuk mengetahui perilaku pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana.

1.5.2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya perilaku pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan teori ilmu politik, khususnya perilaku pemilih.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pihak yang terkait perilaku pemilih dan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi warga Desa Batuagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai perilaku pemilih di Desa Batuagung dalam pelaksanaan pemilu.
2. Bagi KPU Daerah Jembrana, partai-partai politik, dan kontenan partai di Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan sosialisasi atau kampanye dalam rangka pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jembrana.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dengan pendekatan yang berbeda.